Dinamika Koperasi Indonesia Mempertahankan Jati Diri didalam Persaingan Era Global

Oleh : Murpin Josua Sembiring *

Abstract

This study wants analysis cooperatives in Indonesia is still very relevant and appropriate as the pillar of Indonesia's economy as a manifestation of economic democracy with shared values and common prosperity instead of adversarial competition with each other. Conventional economics that is currently taught in the academic world too believe in the role of competition, that is through free market competition will be progress or remarkable efficiency, but in fact, free-market competition in displacing the weak and only promoting and encouraging a strong. Competitively free fight and predators, the strong get rid of, even prey on the weak. As a result, what happens is that the economic development of displacing the poor, not poverty and inequality must be happening everywhere. Judging from these principles of cooperatives is the institutional embodiment of the anti-capitalism which is the child of globalization. Therefore, encouraging co-operative means to stem the negative effects of globalization. Let, meaning not to position people to compete equally. Not protect it, thus killing the welfare of millions of street vendors, laborers, fishermen, and farmers who became our nation's common people.

Keyword: *cooperatives, cooperative identity, competition, global era*

1. Pendahuluan

Masyarakat kampus saatnya bertekad dan berkeinginan untuk meningkatkan peran dan kontribusi koperasi (khususnya koperasi mahasiswa dan koperasi pada umumnya) terhadap ketahanan/kedaulatan perekonomian nasional dalam dinamika perubahan global, dengan lebih bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas koperasi agar menjadi badan usaha yang tangguh, kuat, dan profesional di berbagai sektor, sehingga mampu memenuhi

* **Murpin Josua Sembiring** adalah Dosen Kopertis Wil.VII Jatim, dpk. FE Unitomo, Ketua koperasi kopertis Wil.VII dan Ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRI) Kota Surabaya

kepentingan ekonomi anggota dan masyarakat lingkungannya dan itu bisa dimulai dari mahasiswa. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Meskipun kenyataan tersebut masih jauh dari cita-cita, namun semangat untuk menjadikan koperasi sebagai tuan rumah di negeri sendiri tak akan pernah padam. Koperasi sebagai sokoguru adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi sebagaimana digariskan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kegagalan koperasi jaman dulu menjadi bahan koreksi masa depan. Prinsip dan jati diri koperasi harus tetap dipertahankan, namun bukan berarti cara yang ditempuhnya harus tetap sama. *Kalau kita ingin memperoleh hasil yang baru jangan gunakan cara-cara lama.* Kita tidak bisa menjalankan koperasi sama seperti zaman Bung Hatta, karena dunia, teknologi, informasi dan pendidikan itu sangat dinamis. Kita harus mengubah caranya, asalkan tidak mengubah tujuannya, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam rasa kekeluargaan dan kebersamaan sebagai satu Bangsa.

Menanamkan semangat koperasi di kalangan masyarakat modern dan komunitas intelektual menjadi strategis. Filosofi koperasi adalah sokoguru ekonomi bangsa ternyata masih jauh api dari panggang. Buktinya, sepanjang 2010 gerakan koperasi di Indonesia terjerat persoalan kompleks yang membuatnya sulit berkembang. Sepanjang 2010 itu pula gerakan koperasi belum mampu berkontribusi besar dalam sektor perekonomian karena terjerat kompleksnya persoalan mulai dari kelembagaan hingga aturan perundangan sehingga koperasi mayoritas dalam kekecilan usahanya.

Pasal 33 UUD 1945 sama sekali tidak anti usaha besar bahkan perlu membangun diri menjadi besar. Pasal 33 hanya menegaskan bahwa yang besar itu perlu dimiliki oleh orang banyak, mereka yang terkait dalam suatu *common bond*, yaitu dalam keterkaitan *produksi*, *konsumsi*, dan *teritori*. Jadi tidak menjadi relevan lagi mempertanyakan keberadaan koperasi dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi memang memerlukan usaha-usaha besar yang efisien, tanpa mengabaikan bahwa yang kecil-kecil dan efisien pun bisa *strongly survived*.

Koperasi merupakan lembaga sosial-ekonomi “untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama”. Upaya ini dapat tumbuh dalam masyarakat sendiri berkat munculnya kesadaran pemberdayaan diri (*self-empowering*), namun dapat pula ditumbuhkan dari luar masyarakat sebagai upaya pemberdayaan *agents of development*, baik oleh pemerintah, elit masyarakat, mahasiswa, perguruan tinggi maupun oleh organisasi-organisasi

kemasyarakatan, LSM, dll, yang berpendekatan *grassroots* dan *bottom-up*. Dengan perkataan lain, “menolong diri sendiri secara bersama-sama” sebagai kecenderungan *Gemeinschaft* itulah, yang apabila diformalkan (diberi wajah) ke arah *Gesellschaft*, akan menjadi badan usaha bersama, yang kita sebut Koperasi itu.

Koperasi mempersatukan kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial yang kecil-kecil menjadi satu kekuatan besar, sehingga terbentuk kekuatan berganda-ganda (sinergis) yang lebih tangguh. Dari sinilah semangat menolong diri sendiri secara bersama-sama memperoleh awal momentumnya untuk mandiri. Mandiri adalah hasil dari kegiatan *self-empowerment*. Oleh karena itu, apabila upaya membina masyarakat dan mahasiswa melalui koperasi tidak *bertitik tolak*, *berproses* dan *bertujuan akhir* secara tegas, yaitu untuk menjadikannya mandiri (baik dalam meraih “nilai-tambah ekonomi” ataupun “nilai-tambah sosial-kultural”), maka kesalahan fatal akan terjadi. Setiap bantuan (kredit, bantuan teknis, dan sebagainya) sejak awal harus dijauhkan dari unsur ketergantungan (*dependensi*) dan kemandirian harus merupakan target nyata.

Kita perlu memegang teguh *platform* nasional kita, yaitu bahwa “yang kita bangun ini adalah rakyat bangsa dan negara”. Jadi pembangunan ekonomi dan bisnis harus selalu mengacu dan mendukung pembangunan rakyat bangsa dan negara. Pembangunan ekonomi dan bisnis merupakan derivat dari pada itu. Di sini kita memerlukan kewiraswastaan dengan *state of mind* yang berbeda dengan kewiraswastaan parsial yang menutup diri dari kepentingan nasional, yang lebih luas daripada sekedar kepentingan orang-seorang.

Platform nasional lain adalah yang menyangkut keterpurukan bangsa kita, yang terjebak hutang luar negeri dan hilangnya prinsip kemandirian atau keberdikarian atau kedaulatan ekonomi. Maka kita perlu mengambil sikap bahwa pinjaman luar negeri haruslah bersifat “pelengkap dan sementara”. Maka dimensi tantangan kewiraswastaan Indonesia, lagi-lagi tidak bisa hanya mengacu kepada sikap individualisme, tetap haruslah pula mengacu kepada kebersamaan (yang mengacu pada partisipasi) dan asas kekeluargaan (yang mengacu pada emansipasi) untuk bisa membentuk konsolidasi ekonomi nasional dengan kukuh dan efektif menghadapi globalisasi (Sri-Edi swasono, “Orasi Ilmiah”, Jakarta, 2002).

Pendidikan dan perilaku kewiraswastaan perlu diarahkan agar benar-benar sesuai dengan falsafah Pancasila, di mana asas kekeluargaan (*brotherhood* atau ukhuwah, bukan kekerabatan) dan kebersamaan dalam usaha (*mutuality*) harus tetap menjadi pedoman.

Ciri-ciri keunggulan dari wiraswasta tidak perlu menjadi suatu sikap mandiri yang egosentris dan disfungsi terhadap lingkungan masyarakatnya. Mandiri tidak berarti menjadi penganut paham individualisme dan eksklusivisme, meskipun harus tetap memiliki individualita dan personalita, yaitu memiliki harga-diri, *dignity*, dan harkat-martabat diri bukan egoisme. Oleh karena itu etos kerja Pancasila demi mencapai cita-cita pribadinya orang- per orang dalam konteks kemasyarakatan, harus dapat dibentuk dan dioperasionalkan secepatnya bagi para wiraswasta perkoperasian nasional kita.

2. Koperasi Indonesia Di Tengah Dinamika Global (Perkembangan Koperasi Dunia)

Data pada General Assembly yang diselenggarakan pada 18-19 Oktober 2007 di Singapura, ICA antara lain telah meluncurkan suatu proyek yang disebut ICA Global 300, yang menyajikan profil 300 koperasi kelas dunia. Yang dijadikan kriteria untuk dapat terjaring dalam Global 300 ini, disamping jumlah volume usaha (turnover) serta asset, juga kegiatannya dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (Cooperative Social Responsibility), yang antara lain meliputi: pelaksanaan nilai dan prinsip koperasi, pelaksanaan demokrasi, kepedulian pada lingkungan, serta keterlibatan dalam pembangunan masyarakat. Dengan kriteria ini berbagai jenis koperasi, yang berasal dari 28 negara dengan turnover sejak \$AS 63.449.000.000 hingga \$ 654.000.000, termasuk dalam kelompok koperasi kelas dunia ini. Dari berbagai jenis koperasi tersebut, yang terbanyak adalah koperasi/sektor keuangan (perbankan, asuransi, koperasi kredit/credit union) sebesar 40%, kemudian disusul koperasi pertanian (termasuk kehutanan) sebesar 33%, koperasi ritel/wholesale sebesar 25%, sisanya adalah berbagai macam koperasi, seperti: koperasi kesehatan, energi, manufaktur dan sebagainya.

Dilihat dari penyebarannya, dari 300 koperasi tersebut, 63 koperasi diantaranya berada di Amerika Serikat kemudian disusul 55 koperasi di Perancis. 30 koperasi di Jerman, 23 koperasi di Itali dan 19 koperasi di Belanda.

Cukup menarik, di negara-negara yang biasa kita sebut sebagai negara kapitalis liberal ini, yang tidak memiliki U.U koperasi dan Menteri Koperasi, beberapa di antaranya memiliki koperasi yang memberikan sumbangan cukup berarti pada perekonomian nasionalnya,

khususnya dalam bentuk sumbangan pada PDB, yaitu sebesar 21% di Finlandia, 17.5% di Selandia Baru, 16.4% di Swiss dan 13% di Swedia.

Selain ICA Global 300 yang menyajikan profil koperasi-koperasi klas dunia, dalam Di beberapa negara Asiapun terdapat cukup banyak koperasi yang termasuk dalam daftar Global 300, seperti Jepang yang menempatkan 12 koperasi raksasanya, 2 diantaranya bahkan menduduki peringkat 1 dan 2, yaitu Zeh Noh (koperasi pertanian, yang beromzet \$AS 63.449.000.000) dan asset \$ 18.357.000.000 dan Zenkyoren (koperasi asuransi yang beromzet \$ AS 46.819.000.000) dan asset \$ 406.224.000.000, Kemudian Korea Selatan yang walaupun hanya menempatkan 2 koperasi, satu diantaranya, yaitu NACF (National Agricultural Cooperative Federation) dengan turnovernya sebesar \$AS 24.687.000.000 dan asset \$ 199.783.000.000 menduduki rangking 4. India juga memiliki 2 koperasi unggulan, yang satu koperasi pupuk IFFCO (Indian Farmers Fertilizer Cooperative) yang turnovernya \$AS 1.683.000.000 dan asset \$ 1.251.000.000 (peringkat (peringkat 295). Dan jangan lupa Singapura, negara yang hanya berpenduduk + 4.4 juta itu juga menempatkan 2 koperasi unggulannya, yaitu koperasi asuransi NTUC Income yang turnovernya \$AS 1.273.000.000 dan asset \$ AS 10.015.000.000 (peringkat 180) dan koperasi ritel NTUC Fairprice yang turnovernya \$AS 808.000.000 dan asset \$ AS 586.000.000 (peringkat 264).

Salah satu koperasi klas dunia versi Global 300 ICA yang termasuk dalam kelompok perusahaan klas dunia versi Fortune adalah Credit Agricole Group (Bank kesempatan General Assembly tersebut ICA juga meluncurkan Developing 300 Project, yang menyajikan profil koperasi-koperasi di negara sedang berkembang dengan kriteria turnover dan asset yang lebih rendah, yang tertinggi Saludcoop koperasi kesehatan Columbia yang turnovernya sebesar \$ AS 504.681.000 dan assetnya \$ AS 223.893.000, sedangkan yang terendah adalah koperasi pertanian Uganda yang turnovernya \$ AS 512.000 dan assetnya \$ 399.000. Kedalam kelompok ini 5 negara Asia: Malaysia, Pilipina, Muangthai, Srilangka dan Vietnam masing-masing menempatkan 5 koperasi, sedangkan 4 negara Afrika: Ethiopia, Kenya, Tanzania dan Uganda juga masing-masing menempatkan 5 koperasi; sementara dari Amerika Selatan, Columbia, Kostarika dan Paraguay juga menempatkan masing-masing 5 koperasi.

Di tengah perkembangan koperasi di seluruh dunia, baik di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang seperti diuraikan diatas, **bagaimana dengan perkembangan koperasi di Indonesia?** Seperti kita lihat, apalagi dalam ICA Global 300

yang menyajikan koperasi-koperasi kelas dunia, dalam Developing 300 Projectpun yang menyajikan perkembangan koperasi-koperasi di negara sedang berkembang, tak satupun koperasi dari Indonesia yang masuk daftar.

3. Perkembangan Koperasi Di Indonesia

Hanya sekitar 12 % penduduk Indonesia adalah anggota koperasi. Sedangkan di Malaysia sekitar 24% dari jumlah penduduknya anggota koperasi. Di Singapura 50% dari jumlah penduduknya anggota koperasi. Amerika Serikat adalah negara kapitalis 4 dari 10 penduduknya adalah anggota koperasi. Di Amerika serikat lebih dari 30 koperasi mempunyai pendapatan mencapai 1 miliar dolar Amerika. Sebagian besar koperasi di Indonesia dalam bentuk koperasi simpan pinjam. Padahal di Negara Maju koperasi banyak dalam bentuk koperasi konsumsi. Misalnya, produk *Anlene* dan *Dancow* adalah produk susu dari koperasi di Selandia Baru.

Sejarah nya perkoperasian di Indonesia sudah dikenal pada masa peralihan abad 19-20 –yang berarti sudah lebih dari satu abad- yang kemudian juga dipraktekkan oleh para pimpinan pergerakan nasional. Setelah proklamasi peranan koperasi dipaterikan dalam konstitusi sehingga memiliki posisi politis strategis, kemudian pada tahun 1947 gerakan koperasi menyatukan diri dalam wadah gerakan koperasi, yang saat ini bernama Dekopin.

Dukungan politis dari negara dan wadah tunggal gerakan koperasi, seharusnya koperasi Indonesia sudah bisa mapan sebagai lembaga ekonomi dan sosial yang kuat dan sehat. Tetapi kenyataan menunjukkan, koperasi yang dengan landasan konstitusi pernah didambakan sebagai “soko guru perekonomian nasional” itu, saat ini tidak mengalami perkembangan yang berarti, sehingga amat jauh ketinggalan dari koperasi-koperasi di negara-negara lain, termasuk koperasi di negara sedang berkembang.

Gagasan yang tepat dari founding fathers agar koperasi menjadi “pelaku utama” dalam perekonomian nasional dengan mencantumkan peranan koperasi dalam konstitusi, diterjemahkan oleh pemerintahan demi pemerintahan sesuai dengan misi politiknya. Demikianlah pada masa “orde lama” koperasi menjadi “alat politik” pemerintah dan partai dalam rangka nasakomisasi, pada masa ”orde baru” koperasi menjadi “alat dan bagian integral dari pembangunan perekonomian nasional” yang dilimpahi dengan bermacam fasilitas.

Koperasi Indonesia di era globalisasi ini pada umumnya memiliki tiga tantangan yaitu :

Tantangan pertama, memperbaiki citranya sebagai kumpulan golongan ekonomi lemah pemburu fasilitas.

Kedua, kontribusinya yang meskipun secara sosial cukup tinggi, namun secara nominal masih sangat rendah dalam perekonomian nasional dibandingkan dengan badan usaha swasta.

Ketiga, semakin rendahnya kesadaran masyarakat untuk bergotong-royong melalui koperasi seiring dengan meningkatnya modernitas dan individualisme.

Seluruh anggota koperasi, semestinyalah percaya pada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggung Jawab sosial, dan kepedulian kepada orang lain. Koperasi yang baik, tidak akan membiarkan anggota-anggotanya tertinggal satu sama lain dalam peningkatan kesejahteraannya. Kita bertekad untuk mengelola perubahan dengan cerdas dan arif dengan semangat kebangsaan, kerakyatan, dan kemandirian untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

Dilihat dari prinsip-prinsip ini koperasi adalah pengejawantahan institusional dari gerakan antikapitalisme yang merupakan anak kandung globalisasi. Oleh karenanya, **membesarkan koperasi** berarti membendung efek negatif globalisasi. **Membiarkannya**, berarti memposisikan rakyat untuk bertanding tidak dengan setara. **Tidak melindunginya**, berarti mematikan kesejahteraan jutaan pedagang kaki lima, buruh, nelayan, dan petani yang menjadi rakyat kebanyakan bangsa kita. Hasil penelitian Josua (2012: 111) menyatakan koperasi di Indonesia masih membutuhkan dukungan pemerintah namun ditempatkan dalam kerangka percepatan kemandirian koperasi itu sendiri.

Teori Lazlo Valko menjelaskan tentang dukungan pemerintah dalam pengembangan koperasi (dalam Rozi, 2002 : 71-73). Teori ini menekankan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pembinaan koperasi oleh pemerintah, dan kebijaksanaan apa saja yang dapat ditempuh pada setiap tahapan tersebut. Rozi membagi tahapan dukungan pemerintah menjadi tiga yaitu tahap officialisasi, deofficialisasi, dan otonom. Pada ketiga tahapan tersebut, dukungan pemerintah harus dikurangi agar koperasi dapat tumbuh menjadi koperasi yang otonom dan berorientasi pada anggotanya

Kebijakan yang menempatkan peranan pemerintah sangat dominan dalam pembangunan koperasi, menjadikan gerakan koperasi menjadi sangat tergantung pada

bantuan luar, hal yang sangat bertentangan dengan hakekat koperasi sebagai lembaga ekonomi sosial yang mandiri.

Sikap ketergantungan gerakan koperasi pada era reformasi ini masih sangat kuat, yang antara lain tercermin dari ketergantungan sepenuhnya Dekopin, organisasi tunggal gerakan koperasi pada APBN (satu hal yang mendorong konflik berkepanjangan di kalangan gerakan sendiri), bukan pada dukungan dari anggota-anggotanya sebagai wujud dari kemandirian. Lebih parah lagi antara gerakan koperasi (cq Dekopin) dan Pemerintah (cq Kementerian Koperasi dan UKM) yang seharusnya bahu membahu dalam pembangunan koperasi, seperti yang dilakukan oleh beberapa negara tetangga kita, sulit sekali terjadi, sehingga masing-masing memiliki agenda sendiri-sendiri, dengan akibat pembangunan koperasi menjadi tidak terarah. Termasuk pembangunan koperasi pertanian yang setelah KUD tidak lagi berdaya, belum lagi ada pemikiran untuk membangun koperasi pertanian.

PBB (dengan Konvensi PBB 1999 dan 2001) menegaskan harapannya akan peran pentingnya Koperasi di dunia dalam tiga hal, yaitu: penanggulangan *kemiskinan*, *percepatan lapangan kerja*, dan *memperkuat integrasi sosial*. Ada baiknya para ekonom, teknokrat dan mahasiswa mau membuka mata terhadap kenyataan di dunia dan tidak melakukan *disempowerment* terhadap nurani dan kemampuan berpikir mereka sendiri. Koperasi di seluruh dunia semakin maju. Hanya di Indonesia koperasi terpuruk karena mengingkari jati dirinya, mengadopsi pendekatan *top-down* yang seharusnya adalah *bottom-up*.

4. Koperasi Memilih Kerjasama (Cooperation), Dunia Usaha Mendewakan Persaingan (Competition).

Pengajaran ilmu ekonomi yang diberikan di dunia akademis/kampus adalah yang mementingkan eksistensi dari persaingan (competition) merupakan kesalahan dimana yang seharusnya ditekankan adalah kerjasama (cooperation), demi menciptakan kekuatan untuk meraih kesejahteraan bersama.

Kita selalu mengasumsikan bahwa dengan persaingan di pasar Persaingan (competition) dan kerjasama (cooperation), pada dasarnya merupakan dua kekuatan kembar (the twin-forces) dalam mencapai kemajuan ekonomi nasional. Namun persaingan yang ada harus

dikelola dengan baik agar tidak menjadi destruktif atau menghancurkan pihak-pihak lain dalam suatu kegiatan ekonomi. Ilmu ekonomi konvensional yang saat ini diajarkan di dunia akademis terlalu percaya pada peranan persaingan, artinya melalui pasar persaingan bebas akan terjadi kemajuan atau efisiensi yang luar biasa, namun faktanya, persaingan di pasar-bebas mengusir yang lemah dan hanya memajukan serta membesarkan yang kuat. Akibatnya, yang terjadi adalah pembangunan ekonomi yang mengusir orang miskin, kemiskinan dan ketimpangan pasti terjadi dimana-mana. Efisiensi yang dilakukan oleh koperasi tetap dalam kerangka keuntungan bersama, sebagaimana dikemukakan oleh Mutis (1992:45) bahwa koperasi sebagai *business entity* tidak terlepas dari kegiatan untuk memacu rasionalitas dan meningkatkan efisiensinya sebagai badan usaha.

Ilmu ekonomi konvensional melahirkan kompetisi yang dikenal dengan *neoclassical economics*, yang mana mendominasi pengajaran dan studi ekonomi sehingga disebut pula sebagai *Neoclasical mainstream economics*. *Neoclasical mainstream economics* ini lahir berdasar paham liberalisme, yakni paham yang menghendaki kebebasan seluas-luasnya, dan paham individualism yang mengutamakan kepentingan pribadi. Sharma *and* Fisher (1997) meneliti tentang pengaruh strategi-strategi fungsional (seperti : produktivitas, inovasi, teknologi, pemasaran, organisasional, dan keuangan) terhadap daya saing perusahaan yang ditunjukkan dengan kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan meningkat tentu dengan asumsi menang dalam persaingan dan pasti ada usaha yang terkalahkan.

Ilmu ekonomi sebagaimana disebutkan di atas mendapat tentangan dari pihak yang menyatakan bahwa pola pikir tersebut sangat tidak etis secara moral, karena pola pikir itu mengakibatkan yang miskin atau lemah menjadi termarginalisasi.

Ilmu ekonomi *neoclassical mainstream* yang berdasar pada *competitivism* ini juga ditentang terutama oleh kaum strukturalis yang peka akan ketimpangan struktural yang membela kaum lemah dan miskin. Hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya alasan bahwa *mainstream economics* tersebut berorientasi pada tiga hal yang sarat dengan kecenderungan kerakusan (*greediness*), yang mereka sebut sebagai efisiensi ekonomi (*economic efficiency*). Ketiga hal yang dimaksud adalah bahwa *neoclassical mainstream* bertitik tolak kepentingan atau pamrih pribadi orang-seorang (*self interest*); mencari kepuasan maksimal (*maximizing satisfaction*); mencari laba atau keuntungan maksimal (*maximizing profit*). Dengan demikian terlihat bahwa

mainstream economics yang menekankan persaingan dengan pola pikir pasar bebasnya itu mengabaikan kepentingan bersama seluruh masyarakat.

Dalam hal ini, negara harus terlibat untuk turut campur tangan dengan tidak serta merta menggantungkan nasib rakyat dan kepentingan Negara kepada selera dan kehendak pasar bebas. Negara tidak hanya berperan dalam melindungi yang lemah dan memajukan seluruh rakyat, tetapi negara juga harus mendesain secara struktural dan menata perekonomian agar terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial dari seluruh masyarakat (societal welfare and social justice). Hal tersebut disebabkan karena dalam demokrasi ekonomi, kepentingan masyarakat (public-interest atau social-interest) adalah lebih utama daripada kepentingan orang-seorang (self-interest).

Di samping persaingan, terdapat pula kekuatan ekonomi yang lain, yakni kerjasama. Kerjasama adalah mekanisme dinamis masyarakat yang mengemban paham kebersamaan (mutualism) dan kekeluargaan (brotherhood). Kerjasama melahirkan kekuatan yang berganda-ganda atau sinergi, yang mana melalui semangat gotong-royongnya dapat menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa (extremely powerful economic force). Oleh karena itu, negara harus memajukan sistem kerjasama menghindarkan terjadinya korban persaingan dan sekaligus memajukan ataupun mengefisiensikan kerjasama menuju sinergi optimal.

Demokrasi ekonomi memiliki tiga inti yang merupakan hasil koreksi dari teori neoclassical mainstream, yakni antara lain :

- 1) Dominasi kepentingan pribadi (self-interest) yang bersumber pada ideologi individualisme dan neoliberalisme harus dipinggirkan dan kepentingan bersama (mutual-interest/public-interest) harus lebih diutamakan;
- 2) Persaingan bebas (free-fight liberalism) harus dihindari;
- 3) Kerjasama berdasar kebersamaan harus semakin dikemukakan. Adapun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi ini, diperlukan campur tangan dari negara untuk menyusun perekonomian nasional, sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 UUD 1945 sekalipun sudah ada perubahan.

Persaingan sebagai kekuatan ekonomi yang berpaham Hobbesian's homohomini lupus haruslah dikontrol, ditata dan dibatasi agar tidak menimbulkan korban, kerugian atau ketidakadilan nasional. Hal tersebut dapat dilakukan dengan :

- 1) Membuat persaingan menjadi fair;

- 2) Merubah competition menjadi coopetition (kerjasama mengatur persaingan);
- 3) Mereduksi makna bersaing menjadi berlomba-lomba untuk maju, bercontest, dan berconcurr. Dalam hal ini mengandung makna bahwa yang kalah tidak dihabisi, melainkan diangkat dan diberdayakan agar meningkat daya saingnya;
- 4) Berlomba berdasar prinsip win-win dan menghindari win-loose (menghindari zero-sum competition). Dalam hal ini, mengatur dan menumbuhkan kerjasama dan kebersamaan melalui **Triple-Co (co-ownership, co-determination, dan co-responsibility)** perlu dilakukan. Adapun hal ini akan lebih efektif dengan melakukan coopetation yang sudah menjadi jati diri koperasi.

5. Indonesia Mempraktekkan Dan Telah Menjadi Subjek Neoliberalisme- Koperasi Penetralisirnya.

Negara kita adalah Negara yang mempraktekan praktik neoliberalisme dan juga menjadi sebuah subjek neoliberalisme. Kita lihat bagaimana lewat legitimasi undang-undang pemerintah membuka jalan selebar-lebarnya untuk modal asing masuk ke Negara kita, swastanisasi dan privatisasi menjamur dimana-mana. Banyak sekali kekayaan Negara yang diprivatisasi dan tidak semua memberikan keuntungan bagi rakyat kebanyakan kita.

Indonesia menjadi korban akibat dari kebijakan neoliberalisme yang sangat merugikan warga masyarakat. Terutama mereka yang bergerak dalam sektor usaha mikro. Bayangkan saja dengan dibebaskan jalur investasi bagi para pemodal besar mau tidak mau akan menghancurkan sektor ekonomi mikro. Menjamurnya Hypermart, Mini market yang investornya banyak dari luar negeri, menjual barang yang lebih murah dan kualitas yang lebih baik, sudah dan terus mematikan para pedagang kecil di Pasar-pasar tradisional dan ritel tradisional/ toko-toko di perumahan dan perkampungan kita. Ini jelas sangat merugikan dan bila didiamkan akan mengancam perekonomian warga kita.

Tragedi Mala petaka sebelas januari (Malari) yang diinisiasi oleh mahasiswa merupakan perlawanan terhadap praktik-praktik neoliberalisme dimana hampir semua produk asing, khususnya Jepang diboikot, dijarah dan membakar produk-produk tersebut, sebagai aksi penolakan terhadap neoliberalisme sekalipun para demonstrans ditangkap dan di jebloskan kepenjara.

Agenda-agenda ekonomi neoliberal telah dimulai sejak pertengahan 1980-an, seperti halnya paket kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, diwujudkan dengan nyata dalam momentumnya setelah Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan 1997. Dibukanya pasar bebas juga termasuk bagian dari agenda Neoliberalisme. Karena dalam pasar bebas jelas bahwa dominasi Negara sudah tidak ada, hal ini kita lihat dengan tidak adanya pajak atau cukai. Sementara Negara tidak bisa ikut melakukan intervensi dalam hal ini. Saat ini memang kita sudah tidak mungkin menolak agenda neoliberalisme, misalnya kita menolak keluar dari CAFTA (China Asean Free Trade Area), tentu hal ini akan berdampak buruk bagi kita di mata internasional. Neoliberalisme harus kita lawan, namun lawan disini bukan berarti kita harus menggunakan cara-cara negative. Banyak cara yang bisa dilakukan dan sebenarnya sudah lama di rumuskan oleh para pendiri bangsa, yaitu badan usaha yang bentuknya koperasi yang mementingkan pencarian keuntungan dan kesejahteraan secara bersama-sama sebagaimana diamanahkan dalam Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

6. Ekonomi Koperasi Dengan *Co-Operativism*-Nya Adalah Ekonomi Masa Depan Indonesia.

Bercermin pada makhluk primitif hidup berdasar insting bersaing, *competitively free fight and predator*, yang kuat menyingkirkan, bahkan memangsa yang lemah. Demikian pula manusia ‘primitif’ pra-beradab akan cenderung berakhlak *homo homini lupus*. Makin ‘beradab’ dalam proses evolusi sejenis makhluk, makin cenderung melepaskan diri dari pertarungan antar sesama, menuju ‘kerja sama’. Demikian pula manusia, makin maju dalam peradaban makin cenderung memupuk kerja sama menuju perilaku sebagai makhluk sosial (*homo-socius*), melepaskan diri dari keprimitifan selaku *homo-economicus*.

Dalam perkembangannya kapitalisme kuno telah berubah menjadi kapitalisme baru yang modern, atas ciri makin berkurangnya kadar *predacious instinct*-nya dalam kehidupan ekonomi. Religi menambah kadar kesosialan manusia, membentuk hidup bersama saling tolong-menolong menjadi *homo-socius* dan sekaligus *homo-religious*. *Paradigma baru ekonomi Mutuality* dan *brotherhood* dalam menjalankan perekonomian seharusnya lebih mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan. Selanjutnya kompetisi (*competition*) dan

kerjasama (*co-operation*) adalah dua kekuatan kembar yang tak terpisahkan (*inseparable twin forces*) dalam proses menuju modernisasi.

Ilmu ekonomi yang diajarkan di sekolah-sekolah dan kampus-kampus kita yang saat ini masih mengacu dan terjebak di dalam pasialisme ekonomi. Reformasi kurikulum perlu dilakukan sehingga pengajaran ilmu ekonomi dapat mencapai bentuk utuhnya yang bersifat holistik.

Bangsa kita sudah masuk pada pola pikir kapitalistik dan sistem ekonomi subordinasi (*yang predatory*) nampak dalam penggantian pasal 27 ayat 2 UUD 1945 (asli) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, menjadi Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta *berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*” dan Pasal 28B “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perilaku yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perubahan tadi jelas merupakan senjata tersembunyi bagi mempertahankan hubungan ekonomi yang tidak emansipatif dan hubungan subordinasi, kelompok “tuan” berhak mempertahankan “ketuanan-nya” dan keadilan bagi si “hamba” akan tetap tergantung pada *bargaining position* dari si kuat. Demokrasi ekonomi akan kehilangan unsur emansipasi ekonomi sebagai moralitas dasarnya. Sayangnya Pasal 28 ini (yang menggantikan Pasal 27 ayat 2 UUD asli ditempatkan di bawah Bab Hak Asasi, sehingga berperangai individualisme. UUD 1945, khususnya melalui Pasal 33, menegaskan bahwa dengan bertitik tolak pada paham kebersamaan (mutualism) dan asas kekeluargaan (brotherhood) akan terlahir suatu mekanisme kerjasama gotong royong seluruh komponen bangsa. Hal tersebut pun harus dilandasi dengan Pancasila sebagai suatu filsafat sekaligus ideologi bangsa yang menjadi local wisdom di negara Indonesia.

Daftar Pustaka

ICA, 2002. *Jati Diri Koperasi*, Terjemahan Ibnoe Soedjono, Jakarta : LSP21.

Josua Murpin, 2012. Pengaruh Dukungan Pemerintah, partisipasi Anggota dan Budaya Organisasi terhadap Strategi dan Kinerja Koperasi Wanita di Jawa Timur. **Disertasi**, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga.

Mutis, Thoby, 1992. *Pengembangan Koperasi*, Kumpulan Karangan Thoby Mutis. Jakarta : PT. Gramedia.

Rozi dan Etha, 2002. *Ekonomi Koperasi*, Surabaya: Bintang

Sharma,B., Fisher,T, 1997. Functional Strategies and Competitiveness: An Empirical Analysis Using Data From Australian Manufacturing. *Benchmarking for Quality Management and Technology*.Vol 4: pp 286-294.